

2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- NERACA
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan atas Laporan Keuangan	
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	1
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan SKPD	1
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD	3
2.1 Ekonomi Mikro	3
2.2 Kebijakan Keuangan	3
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	4
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	5
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	5
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	6
BAB IV Kebijakan Akuntansi	7
4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	6
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	8
4.3 Basis pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	8
4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	9
4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan	9
4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang	10
4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	11
4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.....	13

4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban	13
4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO.....	15
4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA.....	16
4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja	17
4.13 Kebijakan Akuntansi Beban.....	18
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	21
5.1 Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	21
5.1.1 Pendapatan LRA	21
5.1.2 Belanja	22
5.2 Rincian dan Penjelasan Pos Neraca	40
5.2.1 Aset	40
5.2.2 Kewajiban	50
5.2.3 Ekuitas	50
5.3 Rincian dan Penjelasan Akun Laporan Operasional	51
5.3.1 Pendapatan LO	51
5.3.2 Beban LO	51
5.3.3 Surplus/Defisit LO	67
5.4 Rincian dan Penjelasan Komponen Laporan Perubahan Ekuitas	68
5.4.1 Ekuitas Awal	68
5.4.2 Surplus/Defisit LO	68
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan.....	68
5.4.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan	69
5.4.5 Ekuitas Akhir	69
BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.....	70
BAB VII Penutup.....	71

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
2.1 Ekonomi Makro	2
3.1 Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020	4
3.2 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2020	4
5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	21
5.2 Rincian Realisasi PAD.....	22
5.3 Rincian Anggaran Belanja	22
5.4 Rincian Belanja Operasi.....	22
5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	23
5.6.a Rincian Belanja Pegawai Bulan Januari-April.....	23
5.6.b Rincian Belanja Pegawai Bulan Mei-Agustus	24
5.6.c Rincian Belanja Pegawai Bulan September-Desember	25
5.7 Rincian Belanja Barang dan Jasa	25
5.8 Rincian Belanja Barang	26
5.9.a Rincian Belanja Barang Bulan Januari-April.....	27
5.9.b Rincian Belanja Barang Bulan Mei-Agustus	27
5.9.c Rincian Belanja Barang Bulan September-Desember	28
5.10 Rincian Belanja Jasa	29
5.11.a Rincian Belanja Jasa Bulan Januari-April.....	30
5.11.b Rincian Belanja Jasa Bulan Mei-Agustus	31
5.11.c Rincian Belanja Jasa Bulan September-Desember	31
5.12 Rincian Belanja Pemeliharaan	32
5.12.a Rincian Belanja Pemeliharaan Bulan Januari-April.....	33
5.12.b Rincian Belanja Pemeliharaan Bulan Mei-Agustus	34
5.12.c Rincian Belanja Pemeliharaan Bulan September-Desember	34
5.13 Rincian Belanja Perjalanan Dinas	35
5.14.a Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan Januari-April	35
5.14.b Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan Mei-Agustus	35
5.14.c Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan September-Desember	35
5.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin.....	36
5.16 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin	36
5.17.a Rincian Belanja Modal Bulan Januari-April.....	37

5.17.b	Rincian Belanja Modal Bulan Mei-Agustus	37
5.17.c	Rincian Belanja Modal Bulan September-Desember.....	38
5.18	Rincian SILPA	38
5.19	Rincian Pos Neraca	40
5.20	Rincian Aset.....	42
5.21	Rincian Aset Lancar	43
5.22	Rincian Piutang Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	42
5.23	Rincian Beban Dibayar Dimuka	44
5.24	Rincian Aset Tetap.....	45
5.25	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	46
5.26	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	48
5.27	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	49
5.28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	49
5.29	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO	51
5.30	Rincian Beban-LO	52
5.31	Rincian Beban Pegawai.....	52
5.32.a	Rincian Beban Pegawai Bulan Januari-April.....	53
5.32.b	Rincian Beban Pegawai Bulan Mei-Agustus	54
5.32.c	Rincian Beban Pegawai Bulan September-Desember	54
5.33	Rincian Beban Barang dan Jasa	55
5.34	Rincian Beban Barang.....	55
5.35.a	Rincian Beban Barang Bulan Januari-April.....	56
5.35.b	Rincian Beban Barang Bulan Mei-Agustus	57
5.35.c	Rincian Beban Barang Bulan September-Desember	58
5.36	Rincian Beban Jasa	58
5.37.a	Rincian Beban Jasa Bulan Januari-April.....	60
5.37.b	Rincian Beban Jasa Bulan Mei-Agustus	60
5.37.c	Rincian Beban Jasa Bulan September-Desember	61
5.38	Rincian Beban Pemeliharaan	62
5.39.a	Rincian Beban Pemeliharaan Bulan Januari-April.....	63
5.39.b	Rincian Beban Pemeliharaan Bulan Mei-Agustus	63
5.39.c	Rincian Beban Pemeliharaan Bulan September-Desember	63
5.40	Rincian Beban Perjalanan Dinas	64

5.41.a	Rincian Beban Perjalanan Dinas Bulan Januari-April	64
5.41.b	Rincian Beban Perjalanan Dinas Bulan Mei-Agustus	64
5.41.c	Rincian Beban Perjalanan Dinas Bulan September-Desember	65
5.42	Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi	65
5.43	Rincian Beban Penyusutan.....	65
5.44	Rincian Beban Penyisihan Piutang	66
5.45	Rincian Beban Lain-lain	66
5.46	Rincian Surplus/Defisit LO.....	67
5.47	Laporan Perubahan Ekuitas.....	68

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara periode Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Arga Makmur, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



ZHRIN., S.Sos.
NIP. 19650521 198602 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berkewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada SKPD.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara periode Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2022 yaitu untuk realisasi pendapatan PAD sebesar Rp21.322.730,00 atau sebesar 28,26% dari anggaran sebesar Rp75.448.027,00 sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp4.706.214.953,00 atau sebesar 89,17% dari anggaran sebesar Rp5.278.018.560,00.

Dalam Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 untuk jumlah aset lancar sebesar Rp168.292.642,32 jumlah aset tetap sebesar Rp994.377.652,99 total jumlah aset adalah sebesar Rp1.163.292.170,31 kewajiban sebesar Rp0,00 sehingga jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.163.292.170,31.

Untuk Laporan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk Tahun 2022 yaitu realisasi pendapatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp136.032.260,00 dan tahun 2021 sejumlah Rp74.959.612,00 atau terdapat kenaikan sebesar 81,47%. Untuk realisasi beban pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.893.160.939,33 sedangkan realisasi tahun 2021 adalah Rp3.823.536.463,82 atau terdapat penurunan sebesar 27,97%.

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dengan saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.287.502.615,65 dan surplus/defisit-LO sebesar Rp4.757.128.679,34. Untuk tahun 2022 terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan tahun sebelumnya yaitu koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp123.703.333,00 koreksi nilai aset pindah SKPD sebesar Rp(174.640.000,00) dan koreksi piutang sebesar Rp(1.037.322,00). Untuk kewajiban yang dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.648.892.223,00 dengan demikian ekuitas akhir sebesar Rp1.163.292.170,31.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 AUDITED	(%)	REALISASI 2021 AUDITED
1	PENDAPATAN	5.1.1	75.448.027,00	21.322.730,00	28,26	48.104.498,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	75.448.027,00	21.322.730,00	28,26	48.104.498,00
	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1	75.448.027,00	21.322.730,00	28,26	48.104.498,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		75.448.027,00	21.322.730,00	28,26	48.104.498,00
	PENDAPATAN TRANSPER					
	TRANSPER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transper Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transper Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSPER PEMERINTAH PROVINSI					
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transper Pemerintah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transper		0,00	0,00	0,00	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		75.448.027,00	21.322.730,00	28,26	48.104.498,00
2	BELANJA	5.1.2	5.278.018.560,00	4.706.214.953,00	89,17	3.847.721.680,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 AUDITED	(%)	REALISASI 2021 AUDITED
	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	5.178.101.260,00	4.606.726.053,00	88,97	3.492.134.155,00
	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2.688.978.861,00	2.190.831.139,00	81,37	2.149.188.163,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	2.489.122.399,00	2.415.894.914,00	97,06	1.342.945.992,00
	Belanja Barang	5.1.2.1.2.1	246.107.399,00	244.231.899,00	99,24	150.783.421,00
	Belanja Jasa	5.1.2.1.2.2	1.824.925.000,00	1.775.022.713,00	97,26	895.826.291,00
	Belanja Pemeliharaan	5.1.2.1.2.3	37.590.000,00	36.164.500,00	96,21	52.821.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	5.1.2.1.2.4	362.500.000,00	360.475.802,00	99,44	243.515.280,00
	Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi		5.178.101.260,00	4.606.726.053,00	88,97	3.492.134.155,00
	BELANJA MODAL	5.1.2.2	99.917.300,00	99.488.900,00	99,57	355.587.525,00
	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.1	99.917.300,00	99.488.900,00	99,57	355.587.525,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal		99.917.300,00	99.488.900,00	99,57	355.587.525,00
	BELANJA TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
3	BELANJA TRANSPER					
	BELANJA TRANSPER BAGI HASIL KE DESA					
	Belanja Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transper Bagi Hasil Pendapatan dan Belanja		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		5.278.018.560,00	4.706.214.953,00	89,17	3.847.721.680,00
	SURPLUS/DEPISIT		(5.202.570.533,00)	(4.684.892.223,00)	90,05	(3.799.617.182,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3	(5.202.570.533,00)	(4.684.892.223,00)	90,05	(3.799.617.182,00)

Arga Makmur, 2023
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

ZHRIN., S.Sos.
 NIP. 19650521 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	AUDITED 2022	AUDITED 2021
ASET	5.2.1	1.163.292.170,31	1.288.464.460,65
ASET LANCAR	5.2.1.1		
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana Non Kapitasi JKN dan FKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana BOS		0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara	5.2.1.1.1	0,00	961.845,00
Setara KAS		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pendapatan	5.2.1.1.2	172.382.552,00	58.710.344,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.2.1.1.3	(4.315.190,50)	(3.319.798,57)
Beban dibayar dimuka	5.2.1.1.4	225.280,82	655.308,22
Persediaan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		168.292.642,32	57.007.698,65
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
JUMLAH Dana Bergulir		0,00	0,00
		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.1.2		
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.1	2.893.133.661,99	2.993.656.625,00
Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.2	487.761.000,00	487.761.000,00

URAIAN	REF	AUDITED 2022	AUDITED 2021
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.1.2.3	101.239.000,00	101.239.000,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi penyusutan	5.2.1.2.4	(2.487.756.009,00)	(2.351.859.238,00)
JUMLAH ASET TETAP		994.377.652,99	1.230.797.387,00
DANA CADANGAN		0,00	0,00
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.2.1.3	621.875,00	659.375,00
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.3.1	621.875,00	659.375,00
Aset Lain-lain		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		621.875,00	659.375,00
JUMLAH ASET		1.163.292.170,31	1.288.464.460,65
KEWAJIBAN	5.2.2	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.2.2.1	0,00	961.845,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka		0,00	0,00
Utang Beban		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	961.845,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	961.845,00
EKUITAS			
EKUITAS	5.2.3	1.163.292.170,31	1.287.502.615,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.163.292.170,31	1.288.464.460,65

Arga Makmur, 2023
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

Zahrin., S.Sos.
 NIP. 19650521 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	AUDITED 2022	AUDITED 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPRASIONAL	5.3	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN – LO	5.3.1	136.032.260,00	74.959.612,00	61.072.648,00	81,47,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO					
Pendapatan Pajak Daerah - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	5.3.1.1	136.032.260,00	74.959.612,00	61.072.648,00	81,47,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRASFER - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	5.3.2	4.893.160.939,34	3.823.536.463,82	1.069.624.475,51	27,97
Beban Pegawai	5.3.2.1	2.190.831.139,00	2.149.188.163,00	41.642.976,00	1,94
Beban Barang dan Jasa	5.3.2.2	2.416.324.941,40	1.352.920.802,25	1.063.404.138,75	78,60
Beban Barang	5.3.2.2.1	244.231.899,00	150.783.421,00	93.448.478,00	61,98
Beban Jasa	5.3.2.2.2	1.775.452.740,40	905.801.101,25	869.651.639,15	96,01
Beban Pemeliharaan	5.3.2.2.3	36.164.500,00	52.821.000,00	(16.656.500,00)	(31,53)
Beban Perjalanan Dinas	5.3.2.2.4	360.475.802,00	243.515.280,00	116.960.522,00	48,03
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.3	259.637.604,00	321.293.223,00	(61.655.619,00)	(19,19)
Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.4	995.391,93	134.275,57	861.116,36	641,30
Beban Lain-lain	5.3.2.5	25.371.863,01	0,00	25.371.863,00	100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	REF	AUDITED 2022	AUDITED 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)	1.008.551.827,52	0,27
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)	1.008.551.827,52	0,27
POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	5.3.3	(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)	1.008.551.827,52	0,27

Arga Makmur, 2023
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Bengkulu Utara

Zahrin., S.Sos.
 NIP. 19650521 198602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	AUDITED 2022	AUDITED 2021
EKUITAS AWAL	5.4.1	1.287.502.615,65	1.253.082.405,47
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.2	(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.4.3	(51.973.989,00)	(16.620.120,00)
Koreksi nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset tetap		0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.3.1	123.703.333,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan JIJ		0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Peyisihan Piutang		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tanah		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Peralatan dan Mesin	5.4.3.2	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset JIJ		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Pindah SKPD	5.4.3.3	(174.640.000,00)	0,00
Koreksi Piutang	5.4.3.4	(1.037.322,00)	(16.620.120,00)
Koreksi Dana JK		0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya		0,00	0,00
Koreksi Dana BOS		0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.4.4	4.684.892.223,00	3.799.617.182,00
EKUITAS AKHIR	5.4.5	1.163.292.170,31	1.287.502.615,65

Arga Makmur, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara

ZHRIN., S.Sos.
NIP. 19650521 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dan juga menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi keuangan.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- l. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 63 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- n. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Kebijakan Akuntansi serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN, KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Tabel 2.1 Ekonomi Makro

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB	15,27	16,68	18,31	19,97	-
Pertumbuhan Ekonomi	5,59	5,62	5,24	4,75	5,01

Data BPS Bengkulu Utara jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2017 adalah 293.099 jiwa dengan pengeluaran perkapita 9,56 juta/tahun. Selanjutnya pada periode 2013-2014 perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara tumbuh 5,59%, pada kurun waktu 2014-2015 pertumbuhan Kabupaten Bengkulu Utara meningkat dengan angka pertumbuhan 5,62%, pada kurun waktu 2015-2016 perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara kembali meurun menjadi 5,42%, kemudian menjadi 4,75% pada kurun waktu 2016-2017. Pada kurun waktu 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata tumbuh lebih dari 3,37 pertahun, dan pada kurun waktu 2017-2019 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,01%.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru;
- b. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target belanja adalah:

- a. Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamikan permasalahan yang timbul di masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian;
- d. Belanja barang dan jasa dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan;
- e. Belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan;

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Secara umum target dalam APBD Dinas Komunikasi dan Informatika tercapai/tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021. Hal tersebut dilihat dari target Pendapatan-LRA dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.448.027,00 bisa dicapai sebesar Rp21.322.730,00 atau sebesar 28,26%. Target Belanja dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.278.018.560,00 bisa dicapai sebesar Rp4.706.214.953,00 atau sebesar 89,17%.

Realisasi pendapatan LO pada TA 2022 adalah sebesar Rp136.032.260,00 Realisasi tahun 2021 sebesar Rp74.959.612,00. Realisasi beban pada TA 2021 adalah sebesar Rp3.823536.463,82 sedangkan realisasi tahun 2022 adalah Rp4.893.160.939,33 atau terdapat kenaikan/~~penurunan~~ sebesar 27,97% dari tahun sebelumnya.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 Audited	%
a.	Pendapatan-LRA	75.448.027,00	21.322.730,00	28,26
b.	Belanja	5.278.018.560,00	4.706.214.953,00	89,17
c.	Surplus/Defisit	(5.202.570.533,00)	(4.684.892.223,00)	(90,05)
d.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(5.202.570.533,00)	(4.684.892.223,00)	(90,05)

Tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp21.322.730,00 dari anggaran sebesar Rp75.448.027,00 dan realisasi belanja sebesar Rp4.706.214.953,00 atau 89,17% dari anggaran sebesar Rp5.278.018.560,00.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022 Audited	2021 Audited	%
a.	Pendapatan-LO	136.032.260,00	74.959.612,00	81,47
b.	Beban	4.893.160.939,33	3.823.536.463,82	27,97
c.	Surplus/Defisit-LO	(4.757.128.679,33)	(3.748.576.851,82)	(26,90)

Tabel diatas menggambarkan Realisasi pendapatan-LO pada TA 2022 adalah sebesar Rp136.032.260,00 Realisasi tahun 2021 sejumlah Rp74.959.612,00. atau terdapat kenaikan sebesar 81,47% dari tahun sebelumnya. Realisasi beban pada TA 2021 adalah sebesar Rp3.823.536.463,82 Realisasi tahun 2022 sejumlah Rp4.893.160.939,33 atau terdapat penurunan sebesar 27,97% dari tahun sebelumnya.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pegawai di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dari 62 tenaga kerja yang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 37 orang Tenaga Harian Lepas (THL).
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai.
3. Terbatasnya aksesibilitas teknologi dan aplikasi teknologi dalam pengelolaan keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang di anut. Entitas akuntansi mengacu pada sebuah entitas yang dikukuhkan untuk tujuan akuntansi untuk aktifitas-aktifitas tertentu. Dalam laporan ini entitas akuntansi adalah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022.

Sementara entitas pelaporan merupakan unti pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan mengacu pada organisasi secara keseluruhan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga serta satuan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam laporan ini entitas pelaporan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengamanatkan agar Kabupaten Bengkulu Utara kembali melaksanakan pemetaan, pembentukan dan penyusunan perangkat daerah berdasarkan jenis, kriteria tipologi perangkat daerah dandalam peraturan pemerintahh tersebut kemudian mengamanatkna kembali perihal kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah, DLL yang berhubungan dengan perangkat daerah. Berdasarkan PP tersebut maka sebgai turunan implementasi disusunlah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, APBD sejak Tahun Anggaran 2017. Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan kata SKPD untuk penyebutan OPD (Dinas/Badan/Kantor).

Setiap SKPD sebagai entitas akuntansi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan penggunaan APBD Tahun 2022 dengan menyusun Laporan Keuangan SKPD sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2022 sebagai entitas pelaporan.

Sistem penyusunan dan penatausahaan pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengacu pada ketentuan laporan keunagan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, utang, dan ekuitas – serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD dimana penyusunan APBD Kabupaten Bengkulu Utara disusun berbasis Kas maka pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam LRA diakui berbasis kas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2020 sebagaimana Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dengan kode rekening penganggaran berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan kode rekening atau akun rekening pelaporan berdasarkan mapping rekening akrual. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 didasarkan pada nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan Uang Rupiah. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonversikkan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Seluruh kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.

1. Pengukuran Piutang
Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pengukuran Investasi
Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
 - a. Metode biaya bila kepemilikan kurang dari 20%
 - b. Metode ekuitas bila kepemilikan 20% sampai dengan 50%.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan bila kepemilikan bersifat non permanen.
3. Pengukuran Kewajiban
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban

mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka Kabupaten Bengkulu Utara menyusun Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bengkulu Utara dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 63 Tanggal 04 Desember 2019 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi. Sebagai gambaran umum atas kebijakan akuntansi tersebut dapat kami jelaskan secara umum atas masing-masing komponen kebijakan sebagai berikut :

4.4 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. DEFINISI

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

B. PENGAKUAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Semua Pengembalian kas atas koreksi Belanja yang disetorkan setelah tanggal penyusunan Laporan Keuangan diakui sebagai pendapatan lainnya yang sah.

Kas pada Bendaharawan BLUD/JKN/BOS wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, akan tetapi Bendahara BOS wajib melaporkan saldo kas sebagai dasar perhitungan Kas di BOS pada Laporan Keuangan Daerah.

C. PENGUKURAN

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

C. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga peroleh terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
 - b. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - c. Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

A. DEFINISI

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya pada entitas, yaitu pada saat
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul daripemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan

d. Belum dilunasi sampai akhir periode laporan.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - d. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan.

Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap penagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum.

4.7 Kebijakan Akuntansi Aset tetap

A. DEFINISI

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

B. PENGAKUAN

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang

telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sesuai huruf (g), akan diperlakukan sebagai Persediaan/Aset Lainnya.

2. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi DEFINISI aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatatnya.
3. Dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
5. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
6. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100% diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (PHO) walaupun sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan pembayaran, diakui sebagai aset tetap.
7. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

C. PENGUKURAN

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang di konstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. DEFINISI

1. **Aset Lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

B. PENGUKURAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Amortisasi Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pihak Ketiga.

C. PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. DEFINISI

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomis pemerintah daerah.

B. PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
3. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
4. Utang Beban diakui pada saat :
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
5. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. Barang yang dibeli sudah diterima
 - b. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan.

C. PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

A. DEFINISI

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila

terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official asesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

A. DEFINISI

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri

yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mebukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.12 Kebijakan Akuntansi Belanja

A. DEFINISI

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

B. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.13 Kebijakan Akuntansi Beban

A. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

B. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya, tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu :
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah, dimana pengakuan beban dilakukan setelah

pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar dimuka (akun neraca), aset tetap, dan aset lainnya.

9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal, sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu :
 - a. Beban pegawai, diakui berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji yang belum dibayar pertanggal 31 Desember
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Cara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka tercatat sebagai pengurang beban;
 - c. Beban Penyusutan dan Amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
 - e. Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
 - f. Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka bilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

C. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pos-pos yang tercakup dalam LRA Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pendapatan-LRA, belanja dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran pelaporan. Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.322.730,00 dari anggaran sebesar Rp75.448.027,00 atau sebesar 28,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp48.104.498,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.781.76800 atau sebesar 44,33% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022 AUDITED	(%)	REALISASI 2021 AUDITED
1	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	75.448.027.00	21.322.730.00	28,26	48.104.498.00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	75.448.027.00	21.322.730.00	28,26	48.104.498.00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 terealisasi sebesar 28,26%. Hal ini merupakan target PAD Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2021 yang dibayarkan pada tahun 2022, sehingga menjadi realisasi PAD Tahun 2022, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rincian Realisasi PAD

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022 Audited
1.	PT. Tower Bersama Group	21.322.730,00
	JUMLAH	21.322.730,00

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp4.706.214.953 atau sebesar 89,17% dari anggaran belanja yaitu sebesar Rp5.278.018.560,00 sedangkan untuk realisasi belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp3.847.721.680,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar Rp858.493.273,00 atau sebesar 22,31%. Rincian anggaran belanja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Rincian Anggaran Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 Audited	%	Realisasi 2021 Audited
Belanja Operasi	5.178.101.260,00	4.606.726.053,00	88,97	3.492.134.155,00
Belanja Modal	99.917.300,00	99.488.900,00	99,57	355.587.525,00
JUMLAH	5.278.018.560,00	4.706.214.953,00	89,17	3.847.721.680,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. Anggaran belanja operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp5.178.101.260,00 dengan realisasi sebesar Rp4.606.726.053,00 atau 88,97% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4 Rincian Belanja Operasi

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 Audited	%	Realisasi 2021 Audited
Belanja Pegawai	2.688.978.861,00	2.190.831.139,00	81,47	2.149.188.163,00
Belanja Barang	246.107.399,00	244.231.899,00	99,24	150.783.421,00
Belanja Jasa	1.842.925.000,00	1.775.022.713,00	96,21	1.439.022.361,00
Belanja Pemeliharaan	37.590.000,00	36.164.500,00	96,21	52.821.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	362.500.000,00	360.475.802,00	99,44	243.515.280,00
JUMLAH	5.178.101.260,00	4.606.726.053,00	88,97	3.492.134.155,00

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp2.190.831.139,00 atau sebesar 81,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.688.978.861,00. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp41.642.976,00 atau sebesar 1,94%. Realisasi belanja pegawai terdiri dari :

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
			Audited		Audited
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.387.938.599,00	1.200.503.780,00	86,50	1.205.724.600,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	380.976.241,00	137.022.458,00	35,97	129.821.136,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	128.661.551,00	101.010.000,00	78,51	164.640.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	76.960.000,00	68.570.000,00	89,10	
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	27.989.414,00	21.540.000,00	76,96	23.570.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras	82.333.241,00	77.416.980,00	94,03	76.185.840,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.240.148,00	1.416.794,00	63,25	1.606.954,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	124.357,00	18.054,00	14,52	18.599,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.573.227,00	2.476.752,00	69,31	0,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.182.083,00	7.430.321,00	72,97	1.248.542,00
11	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	414.000.000,00	399.726.000,00	96,55	7.428.092,00
12	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	146.400.000,00	146.100.000,00	99,80	0,00
13	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	100	360.694.400,00
14	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.400.000,00	20.400.000,00	100	158.950.000,00
	JUMLAH	2.688.978.861,00	2.190.831.139	81,47	2.149.188.163,00

Realisasi belanja pegawai secara umum mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp41.642.976,00 khususnya untuk belanja gaji pokok PNS, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adanya beberapa pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan penambahan pegawai di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas Kominfo berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari eselon II 1 (satu) orang, eselon III 4 (empat) orang, eselon IV 2 (dua) orang, dan staf fungsional 10 (sepuluh) orang dan pelaksana 9 (sembilan) orang. Untuk rincian realisasi Belanja Pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6 a Rincian Belanja Pegawai Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Gaji Perbulan			
			Januari	Februari	Maret	April
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.387.938.599	79.256.300	83.883.600	84.219.200	168.438.400

2	Belanja Tunjangan Keluarga	380.976.241	9.088.928	9.635.516	9.584.838	19.169.676
3	Belanja Tunjangan Jabatan	128.661.551	6.045.000	7.305.000	7.305.000	14.610.000
4	Belanja Fungsional	76.960.000	0.00	4.860.000	4.860.000	9.720.000
5	Belanja Fungsional Umum	27.989.414	1.485.000	1.485.000	1.485.000	2.970.000
6	Belanja Tunjangan Beras	82.333.241	5.286.660	5.503.920	5.431.500	10.863.000
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.240.148	61.055	93.959	86.326	183.143
8	Belanja Pembulatan Gaji	124.357	1.188	1.189	1.228	1.228
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.573.227	190.212	201.318	202.125	202.125
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian	10.182.083	570.644	603.960	606.376	606.376
11	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	414.000.000	0.00	0.00	0.00	105.305.000
12	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	146.400.000	0.00	12.200.000	24.550.000	12.200.000
13	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	0.00	800.000	800.000	1.600.000
14	Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	20.400.000	0.00	1.700.000	3.400.000	1.700.000
JUMLAH		2.688.978.861	101.984.987	128.273.462	142.531.593	347.570.410

Tabel 5.6.b Rincian Belanja Pegawai Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Gaji Perbulan			
			Mei	Juni	Juli	Agustus
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.387.938.599	84.219.200	84.292.300	169.516.500	89.778.800
2	Belanja Tunjangan Keluarga	380.976.241	9.584.838	9.595.072	19.314.700	10.902.008
3	Belanja Tunjangan Jabatan	128.661.551	7.305.000	7.305.000	14.610.000	7.305.000
4	Belanja Fungsional	76.960.000	4.860.000	4.860.000	9.720.000	9.720.000
5	Belanja Fungsional Umum	27.989.414	1.485.000	1.485.000	2.970.000	1.485.000
6	Belanja Tunjangan Beras	82.333.241	5.431.500	5.431.500	10.863.000	5.431.500
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.240.148	86.326	86.326	190.930	166.305
8	Belanja Pembulatan Gaji	124.357	1.228	1.194	2.648	1.234
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.573.227	202.125	202.301	204.535	225.124
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian	10.182.083	606.376	606.903	613.612	646.406
11	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	414.000.000	0.00	61.436.000	0.00	62.116.000
12	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	146.400.000	0.00	0.00	36.250.000	12.700.000
13	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	0.00	0.00	2.000.000	400.000
14	Honorarium Jasa Pengelolaan BMD	20.400.000	0.00	0.00	5.100.000	1.700.000

	yang tidak menghasilkan pendapatan					
JUMLAH		2.688.978.861	113.781.593	175.301.596	271.355.925	202.577.377

Tabel 5.6.c Rincian Belanja Pegawai Bulan September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Gaji Perbulan				Jumlah
			September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.387.938.599	89.435.400	89.435.400	88.958.940	89.069.740	1.200.503.780
2	Belanja Tunjangan Keluarga	380.976.241	10.305.460	10.305.460	10.041.933	10.057.445	137.022.458
3	Belanja Tunjangan Jabatan	128.661.551	7.305.000	7.305.000	7.305.000	7.305.000	101.010.000
4	Belanja Fungsional	76.960.000	4.860.000	4.860.000	5.125.000	5.125.000	68.570.000
5	Belanja Fungsional Umum	27.989.414	1.675.000	1.675.000	1.670.000	1.670.000	21.540.000
6	Belanja Tunjangan Beras	82.333.241	5.721.180	5.721.180	5.866.020	5.866.020	77.416.980
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.240.148	118.680	118.680	118.680	121.426	1.416.794
8	Belanja Pembulatan Gaji	124.357	1.241	1.241	1.289	1.345	18.054
9	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.573.227	214.642	214.642	213.498	213.764	2.476.752
10	Belanja luran Jaminan Kematian	10.182.083	643.933	643.933	640.502	641.300	7.430.321
11	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	414.000.000	0.00	62.116.000	0.00	93.224.000	399.726.000
12	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	146.400.000	12.200.000	11.700.000	11.700.000	12.900.000	146.400.000
13	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	7.200.000
14	Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	20.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	20.400.000
JUMLAH		2.688.978.861	134.580.536	196.196.536	133.740.862	228.295.040	2.190.831.139

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.415.894.914,00 atau sebesar 97,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.489.122.399,00. Rincian belanja barang dan jasa terdiri dari :

Tabel 5.7 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
			Audited		Audited
1	Belanja Barang	246.107.399,00	244.231.899,00	99,24	150.783.421,00
2	Belanja Jasa	1.824.925.000,00	1.775.022.713,00	97,26	895.826.291,00
3	Belanja Pemeliharaan	37.590.000,00	36.164.500,00	96,21	52.821.00,00

4	Belanja Perjalanan Dinas	362.500.000,00	360.475.802,00	99,44	243.515.280,00
	JUMLAH	2.489.122.399,00	2.415.894.914,00	97,06	1.342.945.992,00

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Realisasi belanja Barang tahun 2022 adalah sebesar Rp244.231,00 atau sebesar 99,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp246.107.399,00. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp93.448.478,00 atau sebesar 61,97%. Rincian realisasi belanja barang sebagai berikut :

Tabel 5.8 Rincian Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 Audited	%	Realisasi 2021 Audited
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	32.000.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.551.399,00	20.405.399,00	99,29	24.871.960,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.224.700,00	19.219.300,00	99,97	19.330.972,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.417.500,00	33.528.700,00	97,42	19.021.138,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	4.213.000,00	3.930.000,00	93,28	2.270.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.258.800,00	9.258.500,00	99,99	2.040.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.456.000,00	1.456.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.260.700,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	23.120.000,00	22.644.000,00	97,94	0,00
10	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	19.000.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.509.000,00	94.433.000,00	99,92	15.223.723,00
12	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.357.000,00	8.357.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Bahan-bahan lainnya	0,00	0,00	0,00	12.220.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.544.919,00
	JUMLAH	246.107.399,00	244.231.899,00	99,24	150.783.421,00

Secara umum dari tahun 2021 ke tahun 2022 terhadap alokasi belanja barang dan jasa khusus untuk belanja barang mengalami kenaikan sebesar Rp93.448.478,00 hal ini disebabkan oleh peningkatan anggaran pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Pada tahun 2022 adanya kegiatan Smart City Bengkulu Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan

Kementerian Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga mendapatkan penambahan anggaran pada APBD-P untuk mendukung kegiatan Smart City tersebut.

Untuk rincian realisasi Belanja Barang per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9.a Rincian Belanja Barang Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Januari	Februari	Maret	April
	Belanja Barang					
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.500.000	0.00	2.500.000	2.000.000	1.500.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.551.399	0.00	13.590.599	1.439.800	1.563.300
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.224.700	0.00	11.558.000	0.00	1.352.400
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.417.500	0.00	4.430.400	1.377.000	1.967.100
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	4.213.000	0.00	3.080.000	0.00	0.00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.258.800	0.00	5.451.900	570.400	244.000
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.456.000	0.00	1.456.000	0.00	0.00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.000.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	23.120.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.357.000	0.00	1.684.000	1.684.000	0.00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.509.000	0.00	3.506.000	1.557.500	595.000
12	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	16.500.000	0.00	0.00	4.000.000	0.00
	JUMLAH	229.627.399	0.00	47.256.899	12.628.700	7.221.800

Tabel 5.9.b Rincian Belanja Barang Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Mei	Juni	Juli	Agustus
	Belanja Barang					
1	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	12.500.000	1.000.000	0.00	2.800.000	1.200.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.551.399	0.00	0.00	1.730.400	0.00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	19.224.700	0.00	0.00	3.152.900	0.00

	Kantor- Kertas dan Cover					
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.417.500	0.00	0.00	8.462.100	4.100.100
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	4.213.000	0.00	0.00	520.000	0.00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.258.800	0.00	0.00	630.000	0.00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.456.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.000.000	0.00	0.00	0.00	1.790.000
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	23.120.000	0.00	0.00	0.00	22.644.000
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.357.000	1.663.000	0.00	926.000	0.00
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.509.000	0.00	0.00	13.127.500	1.824.050
12	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	16.500.000	0.00	0.00	3.200.000	0.00
JUMLAH		229.627.399	2.663.000	0.00	34.548.900	31.558.150

Tabel 5.9.c Rincian Belanja Barang September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan				Jumlah
			September	Oktober	November	Desember	
	Belanja Barang						
1	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	12.500.000	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	12.500.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.551.399	0.00	0.00	2.081.300	0.00	20.405.399
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.224.700	1.351.600	0.00	1.804.400	0.00	19.219.300
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.417.500	4.213.200	1.945.500	849.300	6.184.000	33,528.700
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	4.213.000	0.00	0.00	330.000	0.00	3.930.000
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.258.800	1.038.400	0.00	1.323.800	0.00	9.258.500
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.456.000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.456.000
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.000.000	0.00	0.00	0.00	210.000	2.000.000

9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	23.120.000	0.00	0.00	0.00	0.00	22.644.000
10	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.357.000	0.00	1.200.000	0.00	1.200.000	8.357.000
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.509.000	1.157.000	830.000	60.728.000	11.107.500	94.433.000
12	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	16.500.000	9.300.000	0.00	0.00	0.00	16.500.000
JUMLAH		229.627.399	18.560.200	3.975.500	67.116.800	18.701.500	244.231.899

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.775.022.713,00 atau sebesar 97,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.824.925.000,00. Realisasi belanja jasa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp879.925.000,00 atau sebesar 98.14%. Rincian realisasi belanja jasa sebagai berikut :

Tabel 5.10 Rincian Belanja Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022 Audited</u>	%	<u>Realisasi 2021 Audited</u>
1	Belanja Honorarium Tim FPelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.750.000,00	80.750.000,00	99,38	134.800.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Admnitrasi	43.200.000,00	41.900.000,00	97,00	33.600.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Operator	60.000.000,00	59.400.000,00	97,00	95.400.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	10.950.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	19.800.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	19.500.000,00
8	Belanja Tenaga Informasi dan Teknologi	175.200.000,00	168.740.000,00	96,31	264.650.000,00
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.004.985.000,00	967.985.000,00	96,32	44.000.000,00
10	Belanja Air	8.000.000,00	6.922.228,00	86,53	5.856.666,00
11	Belanja Listrik	42.000.000,00	39.038.486,00	92,95	26.187.973,00
12	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	7.057.800,00
13	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet	366.700.000,00	359.578.617,00	98,06	175.367.657,00
14	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.800.000,00	2.652.500,00	45,73	2.687.500,00
15	Belanja Lembur	8.290.000,00	8.283.000,00	99,92	9.174.000,00
16	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.000.000,00	10.272.882,00	57,07	13.894.695,00

17	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Jasa Peliputan Media Massa/Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Jasa Administrasi Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.842.925.000,00	1.775.022.713	97,26	895.826.291,00

Secara umum alokasi belanja barang dan jasa khusus untuk belanja jasa dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp879.196.422,00 yaitu pada Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 lebih diprioritaskan ke Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan untuk kegiatan peliputan TV nasional (kompas TV). Selain itu juga untuk tahun 2022 adanya penurunan belanja tenaga harian lepas sesuai dengan surat edarana bupati nomor 910/5162/BKAD untuk melakukan efisiensi anggaran pada belanja tenaga harian lepas sebesar 50%.

Untuk rincian realisasi Belanja Jasa per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11.a Rincian Belanja Jasa Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Januari	Februari	Maret	April
	Belanja Jasa					
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.750.000	0.00	6.900.000	14.800.000	7.400.000
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.200.000	0.00	3.600.000	7.200.000	3.600.000
3	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000	0.00	5.000.000	9.400.000	5.000.000
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000	0.00	600.000	1.200.000	600.000
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.200.000	0.00	600.000	1.200.000	600.000
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.000.000	0.00	500.000	1.000.000	500.000
7	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	175.200.000	0.00	13.700.000	29.000.000	14.800.000
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.004.985.000	0.00	0.00	0.00	59.400.000
9	Belanja Tagihan Air	8.000.000	0.00	0.00	1.158.533	450.091
10	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000	0.00	2.595.007	5.927.301	2.990.810
11	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000	0.00	800.000	1.600.000	800.000
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	366.700.000	0.00	818.774	1.784.387	413.085
13	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.800.000	0.00	2.652.500	0.00	0.00

14	Belanja Lembur	8.290.000	0.00	0.00	1.120.000	0.00
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.0000.0000	0.00	1.940.433	799.002	799.002
JUMLAH		1.859.425.000	0.00	39.706.714	76.189.223	97.352.988

Tabel 5.11.b Rincian Belanja Jasa Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Mei	Juni	Juli	Agustus
Belanja Jasa						
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.750.000	0.00	0.00	26.250.000	5.650.0000
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.200.000	0.00	0.00	10.000.000	3.600.000
3	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000	0.00	0.00	15.000.000	4.500.000
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000	0.00	0.00	1.800.000	600.000
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.200.000	0.00	0.00	1.800.000	600.000
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.000.000	0.00	0.00	1.500.000	500.000
7	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	175.200.000	1.000.000	0.00	42.540.000	13.700.000
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.004.985.000	118.700.000	0.00	118.185.000	50.700.000
9	Belanja Tagihan Air	8.000.000	601.924	0.00	932.686	595.099
10	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000	3.100.961	0.00	5.832.620	3.239.160
11	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000	0.00	0.00	1.600.000	0.00
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	366.700.000	153.913.086	0.00	826.172	413.086
13	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.800.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Belanja Lembur	8.290.000	0.00	0.00	2.345.000	1.290.000
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.0000.0000	799.002	0.00	1.598.004	799.002
JUMLAH		967.027.312	277.315.971	0.00	230.209.482	86.186.347

Tabel 5.11.c Rincian Belanja Jasa Bulan September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan				Jumlah
			September	Oktober	November	Desember	
Belanja Jasa							
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.750.000	5.650.000	5.650.000	5.200.000	2.750.000	80.250.000
2	Belanja Jasa Tenaga	43.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.100.000	41.900.000

	Administrasi						
3	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	59.400.000
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
5	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
6	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
7	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	175.200.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.900.000	168.740.000
8	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.004.985.000	27.700.000	39.100.000	20.900.000	534.185.000	967.985.000
9	Belanja Tagihan Air	8.000.000	576.973	712.918	605.987	1.288.017	6.922.228
10	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000	3.486.228	3.582.539	3.663.139	4.620.721	39.038.486
11	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000	2.400.000	0.00	0.00	2.400.000	9.600.000
12	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	366.700.000	413.086	413.086	40.670.801	159.913.054	359.578.617
13	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.800.000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.652.500
14	Belanja Lembur	8.290.000	0.00	1.120.000	2.408.000	0.00	8.283.000
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.0000.0000	799.002	913.145	913.145	913.145	10.272.882
JUMLAH		1.859.425.000	65.025.289	75.491.688	98.361.072	730.269.937	1.775.022.713

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2022 adalah sebesar Rp36.164.500,00 atau sebesar 96,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.590.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp16.656.500,00 atau sebesar 31,5%. Rincian realisasi belanja pemeliharaan sebagai berikut :

Tabel 5.12 Rincian Belanja Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022 Audited	%	Realisasi 2021 Audited
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.200.000,00	17.500.000,00	93,58	17.005.000,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Surat Tanda Nomor	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kendaraan				
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	2.824.500,00	92,61	1.220.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	7.500.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.840.000,00	2.840.000,00	100,00	7.000.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	20.096.000,00
	JUMLAH	37.590.000,00	36.164.500,00	96,21	52.821.000,00

Secara umum dari tahun 2021 ke tahun 2022 terhadap alokasi belanja barang dan jasa khusus untuk belanja pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp16.656.500,00,00. Hal ini disebabkan di tahun 2022 tidak dianggarkannya untuk Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

Untuk rincian realisasi Belanja Pemeliharaan per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12.a Rincian Belanja Pemeliharaan Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Januari	Februari	Maret	April
	Belanja Pemeliharaan					
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.700.000	0.00	0.00	2.000.000	0.00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000	0.00	1.830.000	0.00	0.00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	13.000.000	0.00	0.00	5.000.000	0.00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.840.000	0.00	1.460.000	0.00	0.00
	JUMLAH	37.590.000	0.00	3.290.000	7.000.000	0.00

Tabel 5.12.b Rincian Belanja Pemeliharaan Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Mei	Juni	Juli	Agustus
	Belanja Pemeliharaan					
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.700.000	0.00	0.00	1.300.000	0.00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000	0.00	0.00	994.500	0.00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	13.000.000	0.00	0.00	0.00	1.950.000
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.840.000	0.00	0.00	1.180.000	0.00
JUMLAH		37.590.000	8.005.000	0.00	3.474.500	1.950.000

Tabel 5.12.c Rincian Belanja Pemeliharaan Bulan September- Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan				Jumlah
			September	Oktober	November	Desember	
	Belanja Pemeliharaan						
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.700.000	3.000.000	5.000.000	0.00	6.200.000	17.500.000
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.824.500
3	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	13.000.000	3.450.000	0.00	0.00	2.600.000	13.000.000
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.840.000	0.00	0.00	0.00	200.000	2.840.000
JUMLAH		37.590.000	6.450.000	5.000.000	0.00	9.000.000	36.164.500

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2022 adalah sebesar Rp360.475.802,00 atau sebesar 99,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp362.500.000,00. Realisasi belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp116.960.522,00 atau sebesar 48,03%. Rincian realisasi belanja perjalanan dinas sebagai berikut :

Tabel 5.13 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
			Audited		Audited
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	254.400.00,00	253.348.802,00	99,59	180.158.280,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.100.000,00	107.127.000,00	99,10	63.357.000,00
	JUMLAH	382.500.000,00	360.475.802,00	99,44	243.515.280,00

Secara umum dari tahun 2021 ke tahun 2022 terhadap alokasi belanja barang dan jasa khusus untuk belanja perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar Rp116.960.522,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 pandemi covid-19 sudah normal sehingga beberapa kegiatan seperti koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, menghadiri undangan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (tower), peliputan agenda pemerintah daerah, penyelesaian sengketa di komisi informasi publik sudah dapat dilaksanakan seperti biasa.

Untuk rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14.a Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Januari	Februari	Maret	April
	Perjalanan Dinas					
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	254.400.000	0.00	34.163.000	22.668.000	16.254.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.100.000	0.00	4.714.000	13.596.000	8.461.000
	JUMLAH	362.500.000	0.00	38.877.000	36.264.000	24.715.000

Tabel 5.14.b Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Mei	Juni	Juli	Agustus
	Perjalanan Dinas					
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	254.400.000	7.660.000	0.00	36.522.000	9.430.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.100.000	3.750.000	0.00	33.569.000	17.286.000
	JUMLAH	362.500.000	11.410.000	0.00	70.091.000	26.716.000

Tabel 5.14.c Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan				Jumlah
			September	Oktober	November	Desember	
	Perjalanan Dinas						
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	254.400.000	7.851.000	3.495.000	49.967.603	65.338.199	253.348.802

2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.100.000	1.734.000	4.150.000	7.290.000	12.577.000	107.127.000
JUMLAH		362.500.000	9.585.000	7.645.000	57.257.603	77.915.199	360.475.802

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp99.917.300,00 dengan realisasi sebesar Rp99.488.900,00 atau 99,57% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
			Audited		Audited
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.809.600,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	28.490.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5	Belanja Modal Komputer Jaringan	47.952.000,00	47.952.000,00	100,00	120.186.000,00
6	Belanja Modal Personal Komputer	43.969.400,00	43.969.400,00	99,03	72.319.650,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	10.224.500,00
9	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.995.900,00	7.995.900,00	100,00	48.911.500,00
10	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.846.275,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		99.917.300,00	99.488.900,00	99,57	355.587.525,00

Tabel 5.16 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	13	99.488.900,00
	Belanja Modal Personal Komputer	3	43.541.000,00
	-P.C Unit	1	17.800.000,00
	-Lap Top	2	25.741.000,00

	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10	55.947.900,00
	-Belden RJ45 Connector Cat 6	1	1.149.500,00
	-Kabel UTP Belden/STP Cat 6	1	4.015.000,00
	-Mikrotik RBMetalG (Access Point 2 GHz)	1	2.831.400,00
	-Drop Core Global/1 Core	1	22.580.140,00
	-Splitter	1	738,990
	-Modem	1	12.316,40
	-ODP GLOBAL/8 PORT	1	3.284.380
	-Patch Core Global/ns 2 coretech 7	1	3.612.820
	-Tiang Galvanis/ODP 2,5	1	4.598,140
	-Global/Box Panel	1	821.100
	JUMLAH	13	99.488.900,00

Untuk belanja modal dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp256.098.625,00. Realisasi belanja modal pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : 910/5162/BKAD untuk memprioritaskan terlebih dahulu belanja wajib, belanja mengikat serta operasional kantor sehingga dilakukan efisiensi anggaran untuk Belanja Modal.

Untuk rincian realisasi Belanja Modal per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.17.a Rincian Belanja Modal Bulan Januari-April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Januari	Februari	Maret	April
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	47.952.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Personal Komputer	43.969.400	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.995.900	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	99.917.300	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabel 5.17.b Rincian Belanja Modal Bulan Mei-Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan			
			Mei	Juni	Juli	Agustus
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	47.952.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Personal Komputer	43.969.400	0.00	11.200.000	0.00	0.00
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.995.900	0.00	0.00	7.995.900	0.00
	JUMLAH	99.917.300	0.00	11.200.000	7.995.900	0.00

Tabel 5.17.c Rincian Belanja Modal September-Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Rincian Belanja Perbulan				Jumlah
			September	Oktober	November	Desember	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	47.952.000	0.00	0.00	0.00	47.952.000	47.952.000
2	Belanja Modal Personal Komputer	43.969.400	0.00	0.00	14.541.000	17.800.000	43.541.000
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	7.995.900	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.000
JUMLAH		99.917.300	0.00	0.00	14.541.000	65.752.000	99.488.900

5.1.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.684.892.223,00 yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.18 Rincian SILPA

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
BELANJA OPERASI				
1	Belanja Pegawai	2.688.978.861,00	2.190.831.139,00	498.147.722,00
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	20.551.399,00	20.405.399,00	146.000,00
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	19.224.700,00	19.219.300,00	5.400,00
4	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	34.417.500,00	33.528.700,00	888.800,00
5	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	4.213.000,00	3.930.000,00	283.000,00
6	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	9.258.800,00	9.258.500,00	300,00
7	Belanja makanan dan minuman rapat	23.120.000,00	22.644.000,00	476.000,00
8	Belanja komponen-komponen peralatan	94.509.000,00	94.443.000,00	76.000,00
9	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	80.750.000,00	82.250.000,00	500.000,00
10	Belanja jasa tenaga administrasi	43.200.000,00	41.900.000,00	1.300.000,00
11	Belanja jasa tenaga operator komputer	60.000.000,00	59.400.000,00	600.000,00
12	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	175.200.000,00	168.740.000,00	6.460.000,00
13	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	1.004.985.000,00	967.985.000,00	37.000.000,00
14	Belanja tagihan air	8.000.000,00	6.922.228,00	1.077.772,00
15	Belanja tagihan listrik	42.000,00000	39.038.489,00	2.961.514,00
16	Belanja kawat/faksimili/TV berlangganan elanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	366.700.000,00	359.578.617,00	7.121.383,00
17	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	5.800.000,00	2.652.500,00	3.147.500,00
18	Belanja lembur	8,920,000,00	8.283.000,00	7.000,000
19	Belanja iuran jaminan Kesehatan bagi non ASN	18.0000.000,00	10.272.882,00	7.727.118,00

20	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat	18.700.000,00	17.500.000,00	1.200.000,00
21	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tetangga-alat pendingin	3.050.000,00	2.824.500,00	225.500,00
22	Belanja perjalanan dinas biasa	254.400.000,00	253.348.802,00	1.051.198,00
23	Belanja perjalanan dinas dalam kota	108.100.000,00	107.127.000,00	973.000,00
24	Belanja modal peralatan dan mesin	99.917.300,00	99.488.900,00	428.400,00
	Jumlah			571.803.607,00
	Realisasi lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.125.297,00
	Jumlah Total SILPA			517.678.310,00

5.2 Rincian dan Penjelasan Pos Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.163.292.170,31 dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.163.292.170,31

Tabel 5.19 Rincian Pos Neraca

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	<u>Audited Tahun 2022</u>	<u>Audited Tahun 2021</u>
1	Aset	1.163.292.170,31	1.288.464.460,65
2	Kewajiban	0,00	961.845,00
3	Ekuitas	1.163.292.170,31	1.287.502.615,65

5.2.1 ASET

Penjelasan pos-pos aset didasarkan pada jenis aset. Setiap penjelasan pos aset merujuk kepada lampiran terkait sebagaimana disebut pada setiap akhir penjelasan pos. Pos Neraca terdiri dari :

Tabel 5.20 Rincian Aset

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	<u>Audited Tahun 2022</u>	<u>Audited Tahun 2021</u>
1	Aset Lancar	168.292.642,32	57.007.698,65
2	Aset Tetap	994.377.652,99	1.230.797.387,00
3	Aset Lainnya	621.875,00	659.375,00
	JUMLAH	1.163.292.170,32	1.288.464.460,65

5.2.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar berupa piutang pendapatan, penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka. Posisi Aset Lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp168.292.642,32 sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp57.007.698,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Aset Lancar

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	<u>Audited Tahun 2022</u>	<u>Audited Tahun 2021</u>
1	Kas Lainnya	0,00	961.845,00
2	Piutang Pendapatan	172.382.552,00	58.710.344,00
3	Penyisihan Piutang	(4.315.190,50)	(3.319.798,57)
4	Beban Dibayar Dimuka	225.280,82	655.308,22
	JUMLAH	168.292.642,32	57.007.698,65

5.2.1.1.1 Kas Lainnya

Kas lainnya adalah kekurangan setor pajak tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023. Kas lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp961.845,00

5.2.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 sebesar Rp172.382.552,00 adalah Retribusi Menara Telekomunikasi yang belum dibayarkan di tahun 2019, 2021 dan tahun 2022.

Piutang Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.710.344,00 adalah piutang yang belum dibayarkan di tahun 2019, piutang tersebut mengalami koreksi atas piutang tersebut pada tahun 2021 tidak diakui piutang lagi sebesar Rp. 18.466.800 dikarenakan sudah dibayarkan oleh pihak PT Profesional Telekomunikasi pada tanggal 10 Desember 2019. Piutang Pendapatan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp31.855.230,00 nilai ini merupakan saldo piutang mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian berikut:

- PT. Indosat, Tbk Rp. 30.470.220
- PT Profesional Telekomunikasi Rp. 1.385.010

Sedangkan Piutang Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp4.495.062,00. Nilai ini merupakan saldo piutang untuk tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- PT. XL Axiata Tbk Rp. 4.495.062

Sedangkan Piutang Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp.136.032.260,00. Nilai ini merupakan saldo piutang untuk tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- PT. Dayamitra Telekomunikasi Rp. 37.499.100
- PT. Tower Bersama Group Rp. 37.098.050
- PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Rp. 26.068.900
- PT. Indosat Ooredoo Rp. 1.804.770
- PT. Telkomsel Rp. 19.925.390
- PT. (Epid Manara AssetCo) EDOTCO Rp. 1.804.770
- PT.Centratama Menara Indonesia Rp. 11.831.270

Tabel 5.22 Rincian Piutang Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI SKRD	NOMOR SKRD
1	Retribusi Menara Telekomunikasi side Ketahun	1.538.900,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
2	Retribusi Menara Telekomunikasi side Arga Makmur	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
3	Retribusi Menara Telekomunikasi side Gunung Selan	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
4	Retribusi Menara Telekomunikasi side Lais	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
5	Retribusi Menara Telekomunikasi side D6 Ketahun	1.538.900,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
6	Retribusi Menara Telekomunikasi side Pamor Ganda	1.538.900,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
7	Retribusi Menara Telekomunikasi side Air Besi	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019

8	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kemumu	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
9	Retribusi Menara Telekomunikasi side Arga Makmur Dua	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
10	Retribusi Menara Telekomunikasi side Bintunan	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
11	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kerkap	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
12	Retribusi Menara Telekomunikasi side Unit Lima	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
13	Retribusi Menara Telekomunikasi side D3 Ketahun	1.538.900,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
14	Retribusi Menara Telekomunikasi side Sebelat	1.692.790,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
15	Retribusi Menara Telekomunikasi side Suka Makmur	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
16	Retribusi Menara Telekomunikasi side Unit 6	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
17	Retribusi Menara Telekomunikasi side Tebing Kandang	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
18	Retribusi Menara Telekomunikasi side Muara Saung	1.538.900,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
19	Retribusi Menara Telekomunikasi side Lubuk Durian	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
20	Retribusi Menara Telekomunikasi side Agricinal	1.692.790,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
21	Retribusi Menara Telekomunikasi side Gunung Selan	1.385,010,00	555/321/3/DISKOMINFO/BU/XII/2019
22	Retribusi Menara Telekomunikasi side SUM BKL 0021 TB	1.385,010,00	555/236/3/DISKOMINFO/BU/IX/2019
23	Retribusi Menara Telekomunikasi side Gunung Selan	1.037.322,00	555/281/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
24	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kerkap	1.037.322,00	555/279/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
25	Retribusi Menara Telekomunikasi side Lais	1.037.322,00	555/279/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
26	Retribusi Menara Telekomunikasi side Ketahun	1.152.580,00	555/279/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
27	Retribusi Menara Telekomunikasi side Putri Hijau	1.267.838,00	555/279/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
28	Retribusi Menara Telekomunikasi side Suka Makmur	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
29	Retribusi Menara Telekomunikasi side Giri Mulya	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
30	Retribusi Menara Telekomunikasi side Ketahun	1.152.580,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
31	Retribusi Menara Telekomunikasi side Arga Makmur	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
32	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kerkap	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
33	Retribusi Menara Telekomunikasi side Sidomukti	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
34	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kemumu	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
35	Retribusi Menara Telekomunikasi side Air Besi	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
36	Retribusi Menara Telekomunikasi side Bintunan	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
37	Retribusi Menara Telekomunikasi side Muara Saung	1.152.580,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
38	Retribusi Menara Telekomunikasi side Gunung Alam	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
39	Retribusi Menara Telekomunikasi side Penyangkak	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
40	Retribusi Menara Telekomunikasi side Tanjung Raman	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
41	Retribusi Menara Telekomunikasi side Marga Sakti	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
42	Retribusi Menara Telekomunikasi side Karang Anyar II	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
43	Retribusi Menara Telekomunikasi side Giri Kencana	1.152.580,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
44	Retribusi Menara Telekomunikasi side Serangai	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
45	Retribusi Menara Telekomunikasi side Gunung Selan	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
46	Retribusi Menara Telekomunikasi side Air Muring	1.267.838,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
47	Retribusi Menara Telekomunikasi side Dusun I Pasar Bembah	1.037.322,00	555/277/3/DISKOMINFO/BU/X/2021
48	Retribusi Menara Telekomunikasi side Pasar Lais	1.804.770,00	555/01/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
49	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Perbo	1.804.770,00	555/02 /3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
50	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kota Bani, Kel Kota Bani	2.205.830,00	555/03/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
51	Retribusi Menara Telekomunikasi side Ds. Pasar Palik	1.804.770,00	555/04/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
52	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Sukalangu	1.804.770,00	555/05/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
53	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Padang Jaya	1.804.770,00	555/06/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022

54	Retribusi Menara Telekomunikasi side Jl. Lintas Lais-Kerkap Ds Pasar Palik	1.804.770,00	555/07/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
55	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Dusun Curup	1.804.770,00	555/08/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
56	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Bintuhan	1.804.770,00	555/09/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
57	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Gunung Agung	1.804.770,00	555/10/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
58	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Urai Pemandi	2.205.830,00	555/11/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
59	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kel. Suka Makmur	1.804.770,00	555/12/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
60	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Kemumu	1.804.770,00	555/13/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
61	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kel. Sawang Lebar Kec. Air Napal	1.804.770,00	555/14/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
62	Retribusi Menara Telekomunikasi side PT. Sandabi Indah Lestari	1.804.770,00	555/15/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
63	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Air Petai	2.205.830,00	555/16/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
64	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Sido Mukti	1.804.770,00	555/17/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
65	Retribusi Menara Telekomunikasi side Dusun Rawasari	2.005.300,00	555/18/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
66	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kel. Pasar Lais Kec. Lais	1.804.770,00	555/19/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
67	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Fajar Baru, Kec, Ketahun	2.005.300,00	555/20/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
68	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Margajaya	1.804.770,00	555/21/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
69	Retribusi Menara Telekomunikasi side Fajar Baru Ds. Karang Mulyo	2.005.300,00	555/22/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
70	Retribusi Menara Telekomunikasi side Arga Mamur Jl. Syamsul Bahrun	1.804.770,00	555/23/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
71	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kerkap	1.804.770,00	555/24/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
72	Retribusi Menara Telekomunikasi side Unit Lima Ds, Sidomukti	1.804.770,00	555/25/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
73	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kemumu	1.804.770,00	555/26/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
74	Retribusi Menara Telekomunikasi side Air Besi	1.804.770,00	555/27/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
75	Retribusi Menara Telekomunikasi side Bintunan	1.804.770,00	555/28/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
76	Retribusi Menara Telekomunikasi side Muara Saung	2.005.300,00	555/29/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
77	Retribusi Menara Telekomunikasi side Arga Makmur R3 G1 Jl. Gunung Sari	1.804.770,00	555/30/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
78	Retribusi Menara Telekomunikasi side Bengkulu2014_2g2 Desa Penyangkak	1.804.770,00	555/31/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
79	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Tanjung Raman	1.804.770,00	555/32/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
80	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Marga Sakti	1.804.770,00	555/33/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
81	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Karang Anyar II	1.804.770,00	555/34/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
82	Retribusi Menara Telekomunikasi side Giri Kencana	2.005.300,00	555/35/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
83	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Serangai	1.804.770,00	555/36/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
84	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Gunung Selan	1.804.770,00	555/37/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
85	Retribusi Menara Telekomunikasi side Pasar Baru Kota Bani	2.005.300,00	555/38/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
86	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Pasar Bembah Dusun I	1.804.770,00	555/39/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
87	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Marga Sakti	2.005.300,00	555/40/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
88	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Tanjung Muara	2.005.300,00	555/41/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
89	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Napal Putih	2.205.830,00	555/42/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
90	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Tanjung Dalam	2.205.830,00	555/43/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
91	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Bukit Makmur	2.005.300,00	555/44/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022

92	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Karang Anyar I	1.804.770,00	555/45/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
93	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Peninjau	1.804.770,00	555/46/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
94	Retribusi Menara Telekomunikasi side Tanah Hita Desa Marga Sakti	1.804.770,00	555/47/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
95	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Kuro Tidur	1.804.770,00	555/48/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
96	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kota bani Kec. Putri Hijau	2.005.300,00	555/49/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
97	Retribusi Menara Telekomunikasi side Lubuk Durian, Kec. Kerkap	1.804.770,00	555/50/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
98	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Tanjung Harapan	2.205.830,00	555/51/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
99	Retribusi Menara Telekomunikasi side Seblat Desa Kota Bani	2.205.830,00	555/52/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
100	Retribusi Menara Telekomunikasi side Desa Gunung Selan	1.804.770,00	555/53/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
101	Retribusi Menara Telekomunikasi side Suka Makmur	1.804.770,00	555/54/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
102	Retribusi Menara Telekomunikasi side L. Lintas Lais Ketahun/Muko-muko	1.804.770,00	555/55/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
103	Retribusi Menara Telekomunikasi side Ulak Tanding	1.804.770,00	555/56/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
104	Retribusi Menara Telekomunikasi side Putri Hijau Karang Tengah	2.205.830,00	555/57/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
105	Retribusi Menara Telekomunikasi side Putri Hijau Seblat	2.205.830,00	555/58/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
106	Retribusi Menara Telekomunikasi side Ds. Jl. Widuri Utama No 16 Duaun Rawa Sari	2.005.300,00	555/59/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
107	Retribusi Menara Telekomunikasi side Kerkap Bengkulu	1.804.770,00	555/60/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
108	Retribusi Menara Telekomunikasi side Jagobayo Lokasi Dusun I Talang Rasau	1.804.770,00	555/61/3/DISKOMINFO/BU/XII/2022
	JUMLAH	136.032.260	

5.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 sebesar Rp(4.315.190,50) yang merupakan penyisihan piutang total dari piutang pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi yang belum terealisasi sebesar Rp172.382.552,00

5.2.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 sebesar Rp225.280,22 yaitu beban jasa dibayar dimuka yang terdiri dari Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan (Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nilai tagihan yang dibayarkan sebesar Rp2.652.500,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Tabel Rincian Beban Dibayar Dimuka

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA SKPD	NO POLISI	MASA ASURANSI		NILAI ASURANSI YANG DIBAYAR	BEBAN DIBAYAR DIMUKA
			AWAL	AKHIR		
1	Dinas Komunikasi dan Informatika (Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan)	BD 1318 DY	30/01/2022	18/02/2023	2.652.500,00	koreksi225.280,82
JUMLAH					2.652.500,00	225.280,82

5.2.1.2 ASET TETAP

Aset tetap Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 tersebut meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.24 Rincian Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Audited Tahun 2022	Audited Tahun 2021
1	Peralatan dan Mesin	2.893.133.661,99	2.993.656.625,00
2	Gedung dan Bangunan	487.761.000,00	487.761.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.239.000,00	101.239.000,00
4	Akumulasi Penyusutan	(2.487.756.009,00)	(2.351.859.238)
	JUMLAH	994.377.652,99	1.230.797.387,00

5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Perhitungan nilai peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp2,893.133.662,00 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal	2.993.656.625,00	2.737.850.100,00
Koreksi Kesalahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Tambah	0,00	0,00
Belanja Modal	99.488.900,00	355.587.525,00
Mutasi SKPD (pindah SKPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Dinas Pendidikan)	0,00	0,00
Total Koreksi Tambah	99.488.900,00	355.587.525,00
Koreksi Kurang	0,00	0,00
Reklasifikasi aset peralatan dan mesin ke aset jalan irigasi jaringan	0,00	99.781.000,00
Mutasi SKPD (pindah SKPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Dinas Pendidikan)	174.640.000,00	0,00
Extra Comptable	25.371.863,01	0,00
Total Koreksi Kurang	200.011.863,01	0,00
Saldo akhir	2.893.133.661,99	2.993.656.625,00

Secara umum Aset tetap peralatan dan mesin Dinas Kominfo dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp100.522.963,00 hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja modal di tahun 2022 sebesar Rp99.488.900,00 dengan rincian yaitu pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, peralatan pemancar, computer unit dan peralatan komputer. Namun demikian terdapat pula koreksi kurang aset peralatan dan mesin pindah SKPD dari Dinas Komunikasi dan Informatika ke Dinas Pendidikan sebesar Rp174.640.000,00 (kendaraan dinas BD 1193 DY) dan Extra Comptable sebesar Rp25.371.863,01.

Jumlah tersebut merupakan aset tetap peralatan dan mesin milik Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari :

Tabel 5.25 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	293	2.893.133.661,99
	Alat-alat Besar	3	66.590.000,00
	- Electric Generating set Lainnya (dst)	3	66.590.000,00
	Komputer	120	904.152.062,00
	- PC unit	21	282.257.800,00
	- Laptop	18	203.808.850,00
	- Notebook	2	12.000.000,00
	- CPU (Peralatan Mainframe)	1	6.500.000,00
	- Hard disk	1	1.000.000,00
	- Peralatan Mainframe Lainnya (dst)	4	7.000.000,00
	- Peralatan Mini KomputerLainnya	14	45.677.000,00
	- Monitor	1	1.350.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	53.537.257,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	6.050.000,00
	- Server	1	123.891.000,00
	- Router	13	48.795.600,00
	- Hub	8	26.004.000,00
	- Rak Server	1	18.227.000,00
	- Cat 6 Cable	4	15.950.000,00
	- Aces Point	2	6.050.000,00
	- Peralatan Jaringan Lainnya	9	42.423.540,00
	- Peralatan Komputer Lainnya	2	3.630.000,00
	Alat Keselamatan Kerja	1	4.500.000,00
	- Tenda	1	4.500.000,00
	Alat-alat Angkutan	6	856.156.200,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	565.180.000,00
	- Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	1	266.976.200
	- Out Side Broadcast Van Radio	1	24.000.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	22.271.200,00
	- Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (dst)	2	19.933.000,00
	- Scanner (Universal Tester)	1	2.338.200,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	95	476.947.200,00
	- Lemari Kaca	1	3.750.000,00

- CCTV-Camera Control Television System	1	11.809.600,00
- Mesin Absensi	1	2.494.200,00
- Alat Kantor Lainnya	1	5.973.000,00
- Meja Rapat	1	12.375.000,00
- Kursi Tamu	2	11.364.000,00
- Kursi Putar	4	5.623.000,00
- Meubeleur Lainnya	42	109.600.000,00
- Lemari es	1	6.250.000,00
- A.C Split	7	39.350.000,00
- Alat dapur lainnya	2	7.415.000,00
- Televisi	5	72.989.000,00
- Sound System	1	4.950.000,00
- Microphone	8	12.900.000,00
- Camera Video	1	20.790.000,00
- Tangga Aluminium	1	5.100.000,00
- Handy cam	2	51.770.000,00
- Gordyin/Kray	1	5.100.000,00
- Alat rumah tangga lain-lain	11	71.544.400,00
- Meja tamu biasa	2	15.800.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	29	416.002.000,00
- Telephone hybrid	1	2.261.100,00
- Microphone/wireless mic	2	10.000.000,00
- Peralatan studio visual lain-lain	5	102.760.500,00
- Video monitor	1	14.767.500,00
- Lensa Kamera	1	4.400.000,00
- Layar Film/Projector	1	17.000.000,00
- Pesawat telephone	1	1.000.000,00
- Telephone Mobile	2	22.987.500,00
- Handy talky	2	5.280.000,00
- Alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	5	81.635.400,00
- Alat komunikasi social ssb lainnya (dst)	1	1.650.000,00
- Unit pemancar MF/MW portable	1	3.750.000,00
- Alat pemancar HF/SW lain-lain	2	30.400.000,00
- Peralatan Pemancar VHF/FM lain-lain	1	49.500.000,00
- Peralatan antenna VHF/FM lain-lain	1	40.110.000,00
- Audio Processor Am	1	26.000.000,00
- Audio Monitor	1	2.500.000,00
Alat Laboratorium	22	125.065.000,00
- Alat laboratium mekanik tanah dan batuan lainnya	1	20.000.000,00
- Stabilizer	5	29.000.000,00
- Adaptor	1	1.000.000,00
- Distiling Apparatus	5	51.500.000,00
- Papan Panel	2	5.098.500,00
- Papan Planel	1	1.831.500,00
- Recorder display lainnya (dst)	4	12.500.000,00
- Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan)	2	2.100.000,00

	dan Getaran)		
	- Portable Noise Monitoring	1	2.035.000,00
	Alat Persenjataan	22	125.065.000,00
	- Kamera Digital	4	21.450.000,00
JUMLAH		293	2.893.133.661,99

5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Perhitungan nilai gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp487.761.000,00 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal	487.761.000,00	487.761.000,00
Koreksi Tambah	0,00	0,00
Mutasi SKPD (Koreksi Nilai Aset Pindah SKPD)	0,00	0,00
Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin ke KIB gedung dan bangunan	0,00	
Belanja Modal	0,00	0,00
Total Koreksi Tambah	0,00	0,00
Koreksi Kurang	0,00	0,00
Saldo akhir	487.761.000,00	487.761.000,00

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Kominfo dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak mengalami koreksi tambah maupun koreksi kurang sehingga nilainya tetap. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas kominfo terdiri dari bangunan gedung kantor permanen (Jl. jenderal sudirman no 46). bangunan menara radio (Jl. M. Yamin) dan bangunan menara telekomunikasi lain-lain (Dinas Kominfo)

Jumlah tersebut merupakan aset tetap gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari :

Tabel 5.26 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika			487.761.000,00
	Bangunan Gedung			487.761.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.	111,00	284.288.000,00
	Bangunan Menara Radio	ARGA MAKMUR	90,00	109.125.000,00
	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	Dinas Kominfo Kabupaten Bengkulu Utara		94.348.000,00
JUMLAH				487.761.000,00

5.2.1.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 sebesar Rp101.239.000,00 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal	101.239.000,00	1.458.000,00
Koreksi Tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi dari KIB Peralatan dan Mesin ke KIB jalan, irigasi, jaringan	0,00	99.781.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00
Koreksi Kurang	0,00	0,00
Saldo akhir	101.239.000,00	101.239.000,00

Untuk Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kominfo dari tahun 2021 ke tahun 2022 tidak mengalami koreksi tambah maupun koreksi kurang. Aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Kominfo berupa instalasi air bersih lain lain (Jl. M. Yamin) dan Pemasangan Intranet SKPD.

Jumlah tersebut merupakan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari :

Tabel 5.27 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI
1	Dinas Komunikasi dan Informatika			1.458.000,00
	Instalasi			1.458.000,00
	Instalasi Air Bersih Lain-lain	JL.M YAMIN An. DISKOMINFO		1.458.000,00
	Pemasangan Intranet SKPD	30 titik pemasangan		99.781.000,00
JUMLAH				101.239.000

5.2.1.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi perhitungan yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.487.756,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.28 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2022	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2022	NILAI BUKU 31 Des 2022
				Semester I	Semester II		
	Aset Tetap	3.482.133.661,99	2.228.155.905,00	145.717.720,00	113.882.384,00	2.487.756.009,00	994.377.625,00
1	PERALATAN MESIN	2.893.133.661,99	2.087.597.694,00	137.461.871,00	105.626.534,00	2.330.686.099,00	562.447.562,99
2	GEDUNG	487.761.000,00	139.844.796,00	5.724.869,00	5.724.870,00	151.294.535,00	336.466.465,00

	BANGUNAN						
3	JALAN IRIGASI JARINGAN	101.239.000,00	713.415,00	2.530.980,00	2.530.980,00	5.775.375,00	95.463.625,00
	JUMLAH	3.482.133.661,99	2.228.155.905,00	145.717.720,00	113.882.384,00	2.487.756.009,00	994.377.625,00

Untuk rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 1

5.2.1.3 ASET LAINNYA

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Perhitungan nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp696.875,00 adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal	659.375,00	696.875,00
Koreksi tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00	750.000,00
Penyusutan amortisasi aset tak berwujud	37.500,00	37.500,00
Saldo akhir	621.875,00	659.375,00

Aset tak berwujud pada Dinas Kominfo berasal dari reklas pindah tambah dari KIB E (Aset tetap lainnya) berupa perangkat lunak (software aplikasi) dimana yang diakui menjadi aset tak berwujud sebesar Rp659.375,00 dan dikurangi dengan adanya penyusutan amortisasi aset tak terwujud sebesar Rp37.500,00 sehingga total aset tak berwujud sebesar Rp621.875,00

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki kewajiban untuk tahun 2022.

5.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.163.292.170,31 dengan uraian sebagai berikut :

Ekuitas Awal Sebelum Koreksi	1.287.502.615,65	1.253.083.405,47
Ekuitas	1.163.292.170,31	1.287.502.615,65

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.3 Rincian dan Penjelasan Akun Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi. Pendapatan LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp136.032.260,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp61.072.648,00 atau 81,47% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan LO terdiri dari :

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (Pendapatan Retribusi Daerah)

Pendapatan asli daerah LO pada tahun 2022 adalah sebesar Rp136.032.260,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp61.072.648,00 atau 81,47% dari tahun sebelumnya. Yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.29 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	PT Dayamitra Telekomunikasi SKRD Nomor 555/343/3/Diskominfo/BU/XI/2022	37.499.110,00	13.946.218,00	23.552.892,00
2	PT Tower Bersama Group SKRD Nomor 555/344/3/Diskominfo/BU/XII/2022	37.098.050,00	21.322.730,00	15.775.320,00
3	PT Profesional Telekomunikasi SKRD Nomor 555/345/3/Diskominfo/BU/XII/2022	26.068.900,00	14.983.540,00	11.085.360,00
4	PT Indosat Ooredoo SKRD Nomor 555/346/3/Diskominfo/BU/XII/2022	1.804.770,00	1.037.322,00	767.448,00
5	PT Telkomsel SKRD Nomor 555/347/3/Diskominfo/BU/XII/2022	19.925.390,00	19.174.740,00	750.650,00
6	PT. (Epid Manara AssetCo) EDOTCO Nomor 555/348/3/Diskominfo/BU/XII/2022	1.804.770,00	0,00	1.804.770,00
7.	PT. Centratama Menara Indonesia SKRD Nomor 555/349/3/Diskominfo/BU/XII/2022	11.831.270,00	0,00	11.831.270,00
8.	PT XL Axiata Tbk SKRD Nomor 555/350/3/Diskominfo/BU/XII/2022	0,00	4.495.062,00	(4.495.062,00)
	JUMLAH	136.032.260,00	74.959.612,00	61.072.648,00

5.3.2 Beban-LO

Beban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 sebesar Rp4.893.160.939,34 terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyisihan piutang, beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi dan beban penyusutan aset tidak berwujud. Rincian Beban lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Beban-LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai	2.190.831.139,00	2.149.188.163,00	41.642.976,00
2	Beban Barang	244.231.899,00	150.783.421,00	93.448.478,00
3	Beban Jasa	1.775.452.740,40	905.801.101,25	869.651.639,15
4	Beban Pemeliharaan	36.164.500,00	52.821.000,00	(16.656.500,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	360.475.802,00	243.515.280,00	116.960.522,00
7	Beban Penyisihan Piutang	995.391,93	134.275,57	861.116,36
8	Beban Lain-Lain	25.371.863,01	0,00	25.371.863,01
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	243.008.405,00	309.317.344,00	(66.308.939,00)
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.449.739,00	11.449.739,00	0,00
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.061.960,00	488.640,00	4.573.320,00
12	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	37.500,00	37.500,00	0,00
	JUMLAH	4.893.160.939,34	3.823.536.463,82	1.069.624.475,52

Beban pada tahun 2022 sebesar Rp4.893.160.939,34 sementara beban tahun 2021 sebesar Rp3.823.536.463,82 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp1.069.624.475,52. Dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1 Beban Pegawai

Tabel 5.31 Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.200.503.780,00	1.205.724.600,00	(5.220.820,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga	137.022.458,00	129.821.136,00	7.201.322,00
3	Beban Tunjangan Jabatan	101.010.000,00	164.640.000,00	(63.630.000,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional	68.570.000,00	0,00	68.570.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	21.540.000,00	23.570.000,00	(2.030.000,00)
6	Beban Tunjangan Beras	77.416.980,00	76.185.840,00	1.231.140
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.416.794,00	1.606.954,00	(190.160,00)
8	Beban Pembulatan Gaji	18.054,00	18.599,00	(545)
9	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.476.752,00	1.248.542,00	2.476.752,00
10	Beban luran Jaminan Kematian PNS	7.430.321,00	7.428.092,00	6.181.779,00
11	Beban Tambahan Penghasilan PNS	399.726.000,00	360.694.400,00	39.031.600,00
12	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	146.100.000,00	158.950.000,00	12.850.000,00

13	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	8.700.000,00	1.500.000,00
14	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.400.000,00	10.600.000,00	9.800.000,00
	JUMLAH	2.190.831.139,00	2.149.188.163,00	41.642.976,00

Realisasi belanja pegawai secara umum mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp41.642.976,00 khususnya untuk belanja gaji pokok PNS, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adanya beberapa pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan penambahan pegawai di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas Kominfo berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari eselon II 1 (satu) orang, eselon III 4 (empat) orang, eselon IV 2 (dua) orang, dan fungsional 10 (sepuluh) orang. Untuk rincian realisasi Beban Pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.32 a Rincian Beban Pegawai Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Gaji Perbulan			
		Januari	Februari	Maret	April
1	2	4	5	6	7
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	79.256.300	83.883.600	84.219.200	168.438.400
2	Beban Tunjangan Keluarga	9.088.928	9.635.516	9.584.838	19.169.676
3	Beban Tunjangan Jabatan	6.045.000	7.305.000	7.305.000	14.610.000
4	Beban Fungsional	0.00	4.860.000	4.860.000	9.720.000
5	Beban Fungsional Umum	1.485.000	1.485.000	1.485.000	2.970.000
6	Beban Tunjangan Beras	5.286.660	5.503.920	5.431.500	10.863.000
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	61.055	93.959	86.326	183.143
8	Beban Pembulatan Gaji	1.188	1.189	1.228	1.228
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	190.212	201.318	202.125	202.125
10	Beban Iuran Jaminan Kematian	570.644	603.960	606.376	606.376
11	Beban Tambahan Penghasilan PNS	0.00	0.00	0.00	105.305.000
12	Beban Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	0.00	12.200.000	24.550.000	12.200.000
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	800.000	800.000	1.600.000
14	Beban Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	0.00	1.700.000	3.400.000	1.700.000
	JUMLAH	101.984.987	128.273.462	142.531.593	347.570.410

Tabel 5.32.b Rincian Beban Pegawai Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Gaji Perbulan			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
1	2	4	5	6	7
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	84.219.200	84.292.300	169.516.500	89.778.800
2	Beban Tunjangan Keluarga	9.584.838	9.595.072	19.314.700	10.902.008
3	Beban Tunjangan Jabatan	7.305.000	7.305.000	14.610.000	7.305.000
4	Beban Fungsional	4.860.000	4.860.000	9.720.000	9.720.000
5	Beban Fungsional Umum	1.485.000	1.485.000	2.970.000	1.485.000
6	Beban Tunjangan Beras	5.431.500	5.431.500	10.863.000	5.431.500
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.326	86.326	190.930	166.305
8	Beban Pembulatan Gaji	1.228	1.194	2.648	1.234
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	202.125	202.301	204.535	225.124
10	Beban Iuran Jaminan Kematian	606.376	606.903	613.612	646.406
11	Beban Tambahan Penghasilan PNS	0.00	61.436.000	0.00	62.116.000
12	Beban Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	0.00	0.00	36.250.000	12.700.000
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	0.00	0.00	2.000.000	400.000
14	Beban Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	0.00	0.00	5.100.000	1.700.000
JUMLAH		113.781.593	175.301.596	271.355.925	202.577.377

Tabel 5.32.c Rincian Beban Pegawai Bulan September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Gaji Perbulan				Jumlah
		September	Oktober	Nopember	Desember	
1	2	4	5	6	7	
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	89.435.400	89.435.400	88.958.940	89.069.740	1.200.503.780
2	Beban Tunjangan Keluarga	10.305.460	10.305.460	10.041.933	10.057.445	137.022.458
3	Beban Tunjangan Jabatan	7.305.000	7.305.000	7.305.000	7.305.000	101.010.000
4	Beban Fungsional	4.860.000	4.860.000	5.125.000	5.125.000	68.570.000
5	Beban Fungsional Umum	1.675.000	1.675.000	1.670.000	1.670.000	21.540.000
6	Beban Tunjangan Beras	5.721.180	5.721.180	5.866.020	5.866.020	77.416.980
7	Beban Tunjangan	118.680	118.680	118.680	121.426	1.416.794

	PPH/Tunjangan Khusus					
8	Beban Pembulatan Gaji	1.241	1.241	1.289	1.345	18.054
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	214.642	214.642	213.498	213.764	2.476.752
10	Beban Iuran Jaminan Kematian	643.933	643.933	640.502	641.300	7.430.321
11	Beban Tambahan Penghasilan PNS	0.00	62.116.000	0.00	93.224.000	399.726.000
12	Beban Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	12.200.000	11.700.000	11.700.000	12.900.000	146.400.000
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	400.000	400.000	400.000	400.000	7.200.000
14	Beban Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	20.400.000
JUMLAH		134.580.536	196.196.536	133.740.862	228.295.040	2.190.831.139

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa terdiri dari barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.33 Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang	244.231.899,00	150.783.421,00	93.448.478,00
2	Beban Jasa	1.775.452.740,40	905.801.101,25	869.651.639,15
3	Beban Pemeliharaan	36.164.500,00	52.821.000,00	(16.656.500,00)
4	Beban Perjalanan Dinas	360.475.802,00	243.515.280,00	116.960.522,00
	JUMLAH	2.416.324.941,40	1.352.920.802,25	1.063.404.138,75

Beban barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar 2.416.324.941,40 sementara beban barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp1.352.920.802,25 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp1.063.404.138,75. Dengan rincian beban barang dan jasa sebagai berikut :

5.3.2.2.1 Beban Barang

Tabel 5.34 Rincian Beban Barang

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.500.000,00	32.000.000,00	(19.500.000,00)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.405.399,00	24.871.960,00	(4.466.561,00)
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	19.219.300,00	19.330.972,00	(111.672,00)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	33.528.700,00	19.021.138,00	14.507.562,00

5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	3.930.000,00	2.270.000,00	1.660.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.258.500,00	2.040.000,00	7.218.500,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.000.000,00	3.260.700,00	(1.260.700,00)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	22.644.000,00	0,00	22.644.000,00
10	Beban Komponen-Komponen Peralatan	16.500.000,00	19.000.000,00	(3.500.000,00)
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	94.433.000,00	15.223.723,00	79.209.277,00
12	Beban Natura dan Pakan-Natura	8.357.000,00	0,00	8.357.000,00
13	Beban Bahan-bahan lainnya	0,00	12.220.000,00	(12.220.000,00)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.544.919,00	(1.544.919,00)
	JUMLAH	244.231.899,00	150.783.421,00	93.448.478,00

Secara umum dari tahun 2021 ke tahun 2022 terhadap alokasi Beban barang dan jasa khusus untuk Beban barang mengalami kenaikan sebesar Rp93.448.478,00 hal ini disebabkan oleh peningkatan anggaran pada Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas, Beban Makanan dan Minuman Rapat,. Pada tahun 2022 adanya kegiatan Smart City Bengkulu Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga mendapatkan penambahan anggaran APBD-P untuk mendukung kegiatan Smart City tersebut.

Untuk rincian realisasi Beban Barang per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.35.a Rincian Beban Barang Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Barang Perbulan			
		Januari	Februari	Maret	April
	Beban Barang				
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0.00	2.500.000	2.000.000	1.500.000
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0.00	13.590.599	1.439.800	1.563.300
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.00	11.558.000	0.00	1.352.400
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	4.430.400	1.377.000	1.967.100
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	0.00	3.080.000	0.00	0.00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0.00	5.451.900	570.400	244.000

7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0.00	1.456.000	0.00	0.00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Beban Natura dan Pakan-Natura	0.00	1.684.000	1.684.000	0.00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0.00	3.506.000	1.557.500	595.000
12	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0.00	0.00	4.000.000	0.00
JUMLAH		0.00	47.256.899	12.628.700	7.221.800

Tabel 5.35.b Rincian Beban Barang Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Barang Perbulan			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
	Beban Barang				
1	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	1.000.000	0.00	2.800.000	1.200.000
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0.00	0.00	1.730.400	0.00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.00	0.00	3.152.900	0.00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	0.00	8.462.100	4.100.100
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	0.00	0.00	520.000	0.00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0.00	0.00	630.000	0.00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	0.00	0.00	0.00	1.790.000
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00	22.644.000
10	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.663.000	0.00	926.000	0.00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	13.127.500	1.824.050
12	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0.00	0.00	3.200.000	0.00
JUMLAH		2.663.000	0.00	34.548.900	31.558.150

Tabel 5.35.c Rincian Beban Barang September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Barang Perbulan				Jumlah
		September	Oktober	November	Desember	
	Beban Barang					
1	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	12.500.000
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0.00	0.00	2.081.300	0.00	20.405.399
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.351.600	0.00	1.804.400	0.00	19.219.300
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.213.200	1.945.500	849.300	6.184.000	33,528.700
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Pos	0.00	0.00	330.000	0.00	3.930.000
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.038.400	0.00	1.323.800	0.00	9.258.500
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	1.456.000
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	0.00	0.00	0.00	210.000	2.000.000
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	22.644.000
10	Beban Natura dan Pakan-Natura	0.00	1.200.000	0.00	1.200.000	8.357.000
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.157.000	830.000	60.728.000	11.107.500	94.433.000
12	Beban Komponen-Komponen Peralatan	9.300.000	0.00	0.00	0.00	16.500.000
	JUMLAH	18.560.200	3.975.500	67.116.800	18.701.500	244.231.899

5.3.2.2.2 Beban Jasa

Tabel 5.36 Rincian Beban Jasa

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.750.000,00	134.800.000,00	(54.050.000,00)

2	Beban Jasa Tenaga Adminitrasi	41.900.000,00	33.600.000,00	8.300.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Operator	59.400.000,00	95.400.000,00	(36.000.000,00)
4	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	32.900.000,00	32.900.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000,00	10.950.000,00	(3.750.000,00)
6	Beban Jasa Tenaga Keamanan	7.200.000,00	19.800.000,00	(12.600.000,00)
7	Beban Jasa Tenaga Supir	6.000.000,00	19.500.000,00	(13.500.000,00)
8	Beban Tenaga Informasi dan Teknologi	168.740.000,00	264.650.000,00	(95.910.000,00)
9	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	967.985.000,00	44.000.000,00	923.985.000,00
10	Beban Air	6.922.228,00	5.856.666,00	1.065.562,00
11	Beban Listrik	39.038.486,00	26.187.973,00	12.850.513,00
12	Beban Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	7.057.800,00	2.542.200,00
13	Beban Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	359.578.617,00	175.367.657,00	184.210.960,00
14	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.652.500,00	2.032.191,78	620.308,22
15	Beban Lembur	9.174.000,00	9.174.000,00	0,00
16	Beban Premi Asuransi Kesehatan	24.524.813,47	13.894.695,00	10.630.118,47
17	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	0,00	0,00
18	Beban Jasa Peliputan Media Massa/Elektronik	0,00	0,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Harian Lepas	0,00	0,00	0,00
20	Beban Jasa Administrasi Perizinan	0,00	0,00	0,00
21	Beban Jasa Publikasi di Media Massa	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.775.452.740,40	905.801.101,25	869.651.639,15

Secara umum alokasi beban barang dan jasa khusus untuk belanja jasa dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp869.651.639,15 yaitu pada Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan dan Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 lebih diprioritaskan ke Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan untuk kegiatan Peliputan TV Nasional (Kompas TV). Selain itu juga untuk tahun 2022 adanya penurunan Beban Tenaga Harian Lepas Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor : 910/5162/BKAD unttuk melakukan efisiensi anggaran pada Belanja Tenaga Harian Lepas sebesar 50%.

Beban jasa pada Dinas Kominfo TA 2022 dipengaruhi oleh adanya jurnal beban jasa dibayar dimuka pembayaran pajak, bea dan perizinan sebesar Rp. 655.308,22 pada tahun 2021 dan jurnal beban dibayar dimuka pembayaran pajak, bea dan perizinan sebesar Rp225.280,82 Pada Tahun 2022. Untuk rincian realisasi Beban Jasa per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.37.a Rincian Beban Jasa Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Jasa Perbulan			
		Januari	Februari	Maret	April
	Beban Jasa				
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.00	6.900.000	14.800.000	7.400.000
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	0.00	3.600.000	7.200.000	3.600.000
3	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0.00	5.000.000	9.400.000	5.000.000
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0.00	600.000	1.200.000	600.000
5	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0.00	600.000	1.200.000	600.000
6	Beban Jasa Tenaga Supir	0.00	500.000	1.000.000	500.000
7	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0.00	13.700.000	29.000.000	14.800.000
8	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0.00	0.00	0.00	59.400.000
9	Beban Tagihan Air	0.00	0.00	1.158.533	450.091
10	Beban Tagihan Listrik	0.00	2.595.007	5.927.301	2.990.810
11	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0.00	800.000	1.600.000	800.000
12	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0.00	818.774	1.784.387	413.085
13	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	0.00	2.652.500	0.00	0.00
14	Beban Lembur	0.00	0.00	1.120.000	0.00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0.00	1.940.433	799.002	799.002
	JUMLAH	0.00	39.706.714	76.189.223	97.352.988

Tabel 5.37.b Rincian Belanja Jasa Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Jasa Perbulan			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
	Beban Jasa				
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0.00	0.00	26.250.000	5.650.000
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	0.00	0.00	10.000.000	3.600.000
3	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0.00	0.00	15.000.000	4.500.000
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0.00	0.00	1.800.000	600.000
5	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0.00	0.00	1.800.000	600.000
6	Beban Jasa Tenaga Supir	0.00	0.00	1.500.000	500.000
7	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	0.00	42.540.000	13.700.000
8	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	118.700.000	0.00	118.185.000	50.700.000

9	Beban Tagihan Air	601.924	0.00	932.686	595.099
10	Beban Tagihan Listrik	3.100.961	0.00	5.832.620	3.239.160
11	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0.00	0.00	1.600.000	0.00
12	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	153.913.086	0.00	826.172	413.086
13	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Beban Lembur	0.00	0.00	2.345.000	1.290.000
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	799.002	0.00	1.598.004	799.002
JUMLAH		277.315.971	0.00	230.209.482	86.186.347

Tabel 5.37.c Rincian Beban Jasa Bulan September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Jasa Perbulan				Jumlah
		September	Oktober	November	Desember	
	Beban Jasa					
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000	5.650.000	5.200.000	2.750.000	80.250.000
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.100.000	41.900.000
3	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	59.400.000
4	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
5	Beban Jasa Tenaga Keamanan	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
6	Beban Jasa Tenaga Supir	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
7	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.900.000	168.740.000
8	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	27.700.000	39.100.000	20.900.000	534.185.000	967.985.000
9	Beban Tagihan Air	576.973	712.918	605.987	1.288.017	6.922.228
10	Beban Tagihan Listrik	3.486.228	3.582.539	3.663.139	4.620.721	39.038.486
11	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000	0.00	0.00	2.400.000	9.600.000
12	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	413.086	413.086	40.670.801	159.913.054	359.578.617
13	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	0.00	0.00	0.00	0.00	2.652.500
14	Beban Lembur	0.00	1.120.000	2.408.000	0.00	8.283.000

15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	799.002	913.145	913.145	913.145	10.272.882
JUMLAH		65.025.289	75.491.688	98.361.072	730.269.937	1.775.452.740

5.3.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Tabel 5.38 Rincian Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.500.000,00	17.005.000,00	495.000,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00
4	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.824.500,00	1.220.000,00	1.604.500,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	13.000.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00
8	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.840.000,00	7.000.000,00	(4.160.000,00)
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	20.096.000,00	(20.096.000,00)
JUMLAH		36.164.500,00	52.821.000,00	(16.656.500,00)

Secara umum dari tahun 2021 ke tahun 2022 terhadap alokasi beban barang dan jasa khusus untuk beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp16.656.500,00. Hal ini disebabkan di tahun 2022 tidak dianggarkannya untuk beban pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

Untuk rincian realisasi Beban Pemeliharaan per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.39.a Rincian Beban Pemeliharaan Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Pemeliharaan Perbulan			
		Januari	Februari	Maret	April
	Beban Pemeliharaan				
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	2.000.000	0.00
2	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0.00	1.830.000	0.00	0.00
3	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0.00	0.00	5.000.000	0.00
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0.00	1.460.000	0.00	0.00
JUMLAH		0.00	3.290.000	7.000.000	0.00

Tabel 5.39.b Rincian Beban Pemeliharaan Bulan Mei - Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Pemeliharaan Perbulan			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
	Beban Pemeliharaan				
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	1.300.000	0.00
2	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0.00	0.00	994.500	0.00
3	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0.00	0.00	0.00	1.950.000
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0.00	0.00	1.180.000	0.00
JUMLAH		8.005.000	0.00	3.474.500	1.950.000

Tabel 5.39. Rincian Beban Pemeliharaan Bulan September- Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Pemeliharaan Perbulan				Jumlah
		September	Oktober	November	Desember	
	Beban Pemeliharaan					
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.000.000	5.000.000	0.00	6.200.000	17.500.000
2	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	0.00	0.00	0.00	0.00	2.824.500

	Tangga-Alat Pendingin					
3	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	3.450.000	0.00	0.00	2.600.000	13.000.000
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0.00	0.00	0.00	200.000	2.840.000
JUMLAH		6.450.000	5.000.000	0.00	9.000.000	36.164.500

5.3.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Tabel.5.40 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	253.348.802,00	180.158.280,00	73.190.522,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.127.000,00	63.357.000,00	44.743.000,00
JUMLAH		360.475.802,00	243.515.280,00	116.960.522,00

Secara umum dari tahun 2021 ke tahun 2022 terhadap alokasi beban barang dan jasa khusus untuk beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar Rp116.960.522,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 pandemi covid-19 sudah normal sehingga beberapa kegiatan seperti koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, menghadiri undangan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi (tower), peliputan agenda pemerintah daerah, penyelesaian sengketa di komisi informasi publik sudah dapat dilaksanakan seperti biasa.

Untuk rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas per bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.41.a Rincian BebanPerjalanan Dinas Bulan Januari - April

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Perbulan			
		Januari	Februari	Maret	April
Perjalanan Dinas					
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	0.00	34.163.000	22.668.000	16.254.000
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	4.714.000	13.596.000	8.461.000
JUMLAH		0.00	38.877.000	36.264.000	24.715.000

Tabel 5.41.b Rincian Beban Perjalanan Dinas Bulan Mei – Agustus

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Belanja Perbulan			
		Mei	Juni	Juli	Agustus
Perjalanan Dinas					
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.660.000	0.00	36.522.000	9.430.000

2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	0.00	33.569.000	17.286.000
JUMLAH		11.410.000	0.00	70.091.000	26.716.000

Tabel 5.41.c Rincian Belanja Perjalanan Dinas Bulan September - Desember

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Rincian Beban Perbulan				Jumlah
		September	Oktober	November	Desember	
	Perjalanan Dinas					
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.851.000	3.495.000	49.967.603	65.338.199	253.348.802
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.734.000	4.150.000	7.290.000	12.577.000	107.127.000
JUMLAH		9.585.000	7.645.000	57.257.603	77.915.199	360.475.802

5.3.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan dan penyusutan aset lainnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42 Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	243.088.405,00	309.317.344,00	(66.228.939,00)
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.449.739,00	11.449.739,00	0,00
3	Penyusutan Jalan	5.061.960,00	488.640,00	4.573.320,00
4	Penyusutan Aset Lainnya	37.500,00	37.500,00	0,00
JUMLAH		259.637.604,00	321.293.223,00	(61.655.619,00)

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 sebesar Rp259.637.604,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp321.293.223,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp61.655.619,00. Dengan rincian beban penyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.43 Rincian Beban Penyusutan

(Dalam Rupiah)

No	NAMA ASET	PENYUSUTAN		TOTAL
		Semester I	Semester II	
1	Alat-alat Besar	6.296.000,00	5.496.000,00	11.792.000,00
2	Komputer	51.224.564,00	42.026.965,00	93.251.529,00
3	Alat keselamatan kerja	450.000,00	450.000,00	900.000,00
4	Alat-alat Angkutan	15.884.250,00	15.884.250,00	31.768.500,00
5	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.993.300,00	1.993.300,00	3.986.600,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.272.931,00	20.833.538,00	57.106.469,00

7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	19.915.866,00	16.997.523,00	36.913.389,00
8	Alat Laboratorium	5.424.960,00	1.944.958,00	7.369.918,00
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.181.457,00	3.181.457,00	6.362.914,00
10	Bangunan Menara Radio	1.364.062,00	1.364.063,00	2.728.125,00
11	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain	1.179.350,00	1.179.350,00	2.358.700,00
12	Sumur Resapan dan Jaringan Distribusi	2.530.980,00	2.530.980,00	5.061.960,00
13	Perangkat Lunak Sistem Operasi	18,750.00	18,750.00	37.500,00
JUMLAH		145.736.470,00	105.626.534,00	259.637.604,00

Untuk rincian beban penyusutan secara terperinci disajikan pada lampiran 2

5.3.2.4 Beban Penyisihan Piutang

Tabel 5.44 Rincian Tabel Beban Penyisihan Piutang

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Penyisihan Piutang	995.391,93	134.275,57	861.116,36
	JUMLAH	995.391,93	134.275,57	861,116,36

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.995.391,93 yang didapat dari sisa piutang pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp114.709.530,00 Nilai tersebut dikarenakan umur piutang retribusi menara telekomunikasi termasuk dalam penyisihan piutang tak tertagih dalam jangka waktu 1 tahun.

5.3.2.5 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain adalah beban ekstrakom yang merupakan belanja modal Tahun Anggaran 2022 yang nilainya dibawah Rp1.000.000,00 dimana belanja modal tersebut tidak diakui menjadi aset tetap. Nilai beban lain-lain pada tahun 2022 adalah sebesar Rp25.371.863,01 mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun 2021.

Tabel 5.45 Rincian Beban Lain-lain

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Extracompatibel Splitter	738.990,01	0.00	738.990,01
2	Beban Extracompatibel Modem	12.316.440,00	0.00	12.316.440,00
3	Beban Extracompatibel ODP GLOBAL/ 8 PORT	3.284.380,00	0.00	3.284.380,00
4	Beban Extracompatibel Pacth Core Global/ns 2 coretech 7	3.612.820,00	0.00	3.612.820,00
5	Beban Extracompatibel Tiang Galvanis/ODP 2,5	4.598.133,00	0.00	4.598.133,00
6	Beban Extracompatibel Global/Box Panel	821.100,00	0.00	821.100,00
	JUMLAH	25.371.863,01	0.00	25.371.863,01

5.3.3 Surplus/Defisit LO

Pada Tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp4.757.128.679,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Surplus/Defisit LO

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Audited Tahun 2022	Saldo Audited Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)	1.008.551.827,52
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)	1.008.551.827,52

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 Sedangkan untuk tahun 2021 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.4 Rincian dan Penjelasan Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung anataran Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan dan peneurunan ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.

Nilai ekuitas akhir Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.163.292.170,31 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Laporan Perubahan Ekuitas

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Audited 2022	Nilai Audited 2021
1	Ekuitas Awal	1.287.502.615,65	1.253.082.405,47
2	Surplus/Defisit-LO	(4.757.128.679,34)	(3.748.576.851,82)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(51.973.989,00)	(16.620.120,00)
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.703.333,00	
5	Koreksi Nilai Aset Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
6	Koreksi Nilai Aset Pindah SKPD	(174.640.000,00)	0,00
7	Koreksi Piutang	(1.037.322,00)	0,00
8	Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022	4.684.892.223,00	3.799.617.182,00
	JUMLAH	1.163.292.170,31	1.287.502.615,65

Rincian pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 5.4.1 Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.287.502.615,65 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021 pada neraca audited tahun 2021
- 5.4.2 Surplus/Defisit LO sebesar Rp4.757.128.679,34 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.
- 5.4.3 Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus dan Laporan Operasional Tahun 2022, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 5.4.3.1 Koreksi akumulasi penyusutan perataan dan mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp123.703.333,00.
 - 5.4.3.3 Koreksi nilai aset pindah SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(174.640.000,00). Hal ini disebabkan adanya mutasi kendaraan dinas BD 1193 DY ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.

5.4.3.4 Koreksi Piutang

Koreksi lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp(1.037.322,00). Hal ini disebabkan karena adanya koreksi piutang pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi untuk tahun 2021.

5.4.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.684.892.223,00.

5.4.5 Dengan demikian ekuitas akhir Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.163.292.170,31.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk pada tahun 2017 tentang pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas : **ZHRIN., S.Sos.**
Nip : 19650521 198602 1 003
Sekretaris Dinas : **NURHAYATI, S.E., M.M.**
Nip : 19790419 200312 2 005

Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Beban (APBD) disahkan dengan peraturan daerah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, tentang APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika T.A 2022.

Kontijensi yang Tidak Dapat Disajikan dalam Neraca

(diisi jika terdapat suatu peristiwa akuntansi yang pada tanggal neraca belum terdapat kepastian, namun nilai transaksinya cukup materil mempengaruhi posisi laporan keuangan secara keseluruhan di masa yang akan datang)

Kejadian yang Mempunyai Dampak Sosial

(diisi jika terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai dengan ketentuan)

BAB VII PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum.

Penyajian Laporan Keuangan masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menuju masyarakat madani.

Arga Makmur, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



ZHRIN., S.Sos.
NIP. 19650521 198602 1 003